

Kegiatan Advokasi Kasus TSS 2007

No.	Waktu	Kegiatan	Hasil	Keterangan
	<p>Senin, 29 Januari 2007</p>	<p>Monitoring Rapat Kerja Kejaksaan dan Komisi III terkait pembahasan Kasus - kasus pelanggaran HAM Berat, Kejaksaan Agung menyampaikan alasan terhentinya kasus - kasus pelanggaran Ham Berat (TSS, Tragedi Mei 98, Wasior Wamena dan penculikkan Aktifis 1997 / 1998). Prinsip dasar alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Agung masing Mengacu pada pasal 43 UU 26 tahun 2000, bahwa untuk kasus - kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 dibentuk pengadilan HAM ad hoc yang memerlukan rekomendasi DPR RI.</p> <p>Dari 32 anggota Komisi III yang hadir tercatat hanya 6 orang anggota yang merespon kasus - kasus Pelanggaran HAM Berat.</p>	<p>Dari 32 anggota Komisi III yang hadir tercatat hanya 6 orang anggota yang merespon kasus - kasus Pelanggaran HAM Berat. diantaranya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sayus Lumbun menanyakan sikap jaksa agung atas terhentinya kasus - kasus pelanggaran HAM Berat yang di penyidikan ? - Nur Syahbani, menyampaikan protes terhadap Jaksa Agung atas argumentasi nya yang selalu menggunakan alasan pasal 43 UU 26 / 2000. Beny K Harman mempertanyakan Jaksa Agung yang tetap bersikukuh tidak mau menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Mengusulkan jika tidak ada titik temu seharusnya Kejaksaan Agung menempuh cara dengan melaporkan hal ini ke Peradilan Umum, dan jawaban dari peradilan umum bisa dijadikan alasan apakah kasus ini bisa dilanjutkan atau tidak. Cara ini efektif karena dalam prinsip peradilan Hakim tidak boleh menolak perkara 	

			<p>Akhil Mochtar mengusulkan Komisi III segera mendesak paripurna DPR mengeluarkan rekomendasi untuk kasus - kasus pelanggaran HAM Berat yang terhenti di Kejaksaan Agung dan merekomendasikan perubahan pasal 43 UU 26 tahun 2000 agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari.</p> <p>Patrialis Akbar mendesak Jaksa Agung untuk mengirim surat ke DPR RI agar diberikan kepastian untuk menindaklanjuti penyidikan ?</p> <p>Dewi Asmara menyatakan permintaan Jaksa Agung meminta rekomendasi DPR RI sebelum penyidikan sama saja menjerumuskan institusi DPR RI untuk melakukan intervensi.</p> <p>TANGGAPAN JAKSA AGUNG :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak ada rencana untuk meng SP3 kan kasus - kasus pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung.- Mengacu pada kasus Tim - tim dan Tanjung Priok juga memerlukan rekomendasi DPR RI- tidak menyetujui Pendapat melakukan penyidikan tidak perlu menunggu rekomendasi DPR. pada kasus TSS rekomendasi politik DPR RI dibutuhkan	
--	--	--	---	--

			<p>untuk dilakukan penyidikan</p> <p>-</p> <p>- tidak sepakat mengajukan laporan dan meminta putusan ke pengadilan negeri, karena ini wilayah pelanggaran Ham Berat</p> <p>- Pembentukan pengadilan Ham ad hoc didasarkan atas adanya dugaan, berarti DPR RI menduga baru kemudian mengeluarkan rekomendasi ke Presiden.¹</p>	
Selasa, 30 Januari 2007	Siaran pers TENTANG “POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM” bersama Ikohi, FKKM, Paguyuban Mei 1998, IKAPRI	Berisi:	<ul style="list-style-type: none"> • kekecewaan terhadap DPR dan Jaksa Agung yang untuk yang kesekian kalinya gagal mencari jalan keluar bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM • Rapat Kerja Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI pada 29 Januari 2006 berjalan sia-sia dan tanpa itikad baik. Untuk kesekian kalinya saling tuding dalam menyelesaikan kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta kerusuhan Mei 1998. • Presiden SBY masih diam dan tak berusaha mengambil sikap. Padahal Komnas HAM telah 	

¹ Tersedia laporan monitoring lengkap

			menyurati Presiden, memberitahukan hambatan-hambatan maupun hasil dari penyelidikan. Minimal, Presiden SBY memeriksa keterangan Jurubicara Presiden dan Mensesneg yang mengesankan tak pernah ada surat dari Komnas HAM, untuk selanjutnya berbicara ²	
Kamis, 9 Februari 2007	Monitoring Rapat kerja Khusus Komisi III dan Kejaksaan (Kamis,9/2)		TANYA BANG Vijay	
12 Februari 2007	Mengirim surat kepada komisi III, masukan untuk rapat internal komisi III membahas TSS (menanggapi penolakan Jaksa Agung dan polemik pasal 43 UU 26/2000		<p>SURAT BERISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. desakan kepada komisi III untuk mengadakan pertemuan segitiga (Komisi III, Jaksa Agung dan Komnas HAM; perbedaan persepsi pelaksanaan UU 26/2000 2. keharusan jaksa agung memperkuat hasil penyelidikan komnas, bukan menolaknya 3. DPR hanya bertugas mengusulkan pembentukan pengadilan Ham (bukan mengadakan penyelidikan) 	
Senin, 12 Februari 2007	Siaran Pers tentang <i>"Komisi III DPR RI Harus Paksa Jaksa Agung melakukan Penyidikan"</i> bersama Korban dan Keluarga Korban kasus Penculikan dan Penghilangan Aktifis		<p>Siaran pers berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mendorong Komisi III DPR RI segera mengambil sikap atas 	

² Lengkap lihat siaran pers, www.kontras.org

demokrasi 1997-1998, Peristiwa Mei 1998 TSS dan Tanjung Priok, IKOHI, Imparsial dan Demos

Pembangkangan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Kesimpulan Komisi III DPR RI pada Raker Khusus Komisi III dengan Keagung--bahwa akan mendesak paripurna DPR membuat rekomendasi kepada Presiden untuk membuat Keppres Pengadilan HAM Adhoc-- merupakan keputusan yang tidak tepat.

- alasan-alasan dari yang diutarakan Keagung dalam penolakan kerja penyidikannya merupakan argumentasi dari tafsir yang dibuat-buat untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh keagung jelas bertentangan dengan mekanisme yan ada dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, bertentangan dengan kewajiban konstitusional pemerintah, menolak preseden hukum yang pernah ada dalam kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Sikap Keagung ini merupakan tindakan yang tidak

			patut dilakukan oleh seorang Jaksa Agung ³ .	
	5 MARET 2007	Monitoring Tripartit Komnas HAM, Kejaksaan dan Komisi III	<p>Hasil Tripartit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komnas mendorong penyidikan tidak perlu menunggu Pengadilan Ham ad hoc. • Jaksa Agung tetap beranggapan penyidikan perlu dibentuk pengadilan ham ad hoc. • DPR RI membentuk pansus untuk orang hilang 	
	13 Maret 2007	Aksi ke DPR bersama Presma Usakti, Korban 65, FAMSI, KIMND dan keluarga korban. Menuntut DPR mencabut rekomendasi Pansus 2001 dan mengagendakan kasus TSS pada sidang paripurna dan BAMUS 13 Maret 2007, dan menyerahkan kartu pos dukungan kepada Agung Laksono dan cermin kasus untuk anggota DPR	<p>Dilarang masuk oleh PAMNDAL, menggelar aksi di depan Nusantara II. Diterima Zaenal Maarif (mewakili Agung Laksono) jawaban Zanal : 1). harus dipahami konfigurasi yang ada di DPR 2) bersabar dan harus mengikuti prosedur/mekanisme yang ada</p> <p>Keputusan BAMUS 13 Maret: 6 fraksi menolak mengagendakan rekomendasi komisi III untuk diagendakan ke Paripurna FPB, FPPP, FPKS, FPD, FPBR, dan FBPD, empat fraksi sepakat ke diagendakan ke paripurna (FPDIP, FPKB, FPAN dan FPDS</p>	Dan
	14 Maret 2007	Siaran Pers, menyikapi hasil keputusan BAMUS 13	Enam fraksi menolak mengagendakan	

³ Lihat siaran Pers www.kontras.org

		Maret 2007	<p>kasus ini dalam rapat paripurna pada 20 Maret 2007 mendatang.</p> <p>Enam fraksi yang menolak yakni FPG, FPPP, FPKS, FPD, FPBR, dan FBPD. Sedangkan empat fraksi lainnya mendukung, yakni FPDIP, FPKB, FPAN dan FPDS.</p>	
6 Mei 2007	Diskusi Korban dengan Jaringan Mahasiswa dan Pemuda konsolidai gerakan mahasiswa, Pemuda dan korban . Di PMKRI. Bersama Korban Mei, TSS, SMI, LMND, Kompak, FPPI, FMI, SMKI, SMNI, Pawang, SMNK, LS ADI, YPKP, REPDEM, dll	Diskusi membicarakan tentang gagalnya reformasi dan tidak adanya keberpihakan negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM	Digabung dengan kegiatan advokasi Mei	
8 Mei 2007	Rapat ahir persiapan peringatan momentum mei (TTS dan Mei)	Disepakatai untuk membuat rangkaian Kegiatan jangka panjang (menuntut pertanggungjawabab negara terhadap gagalanya reformasi dan penuntasan pelanggaran HAM) pendek (momentum Mei) lengkap ada di Notulensi	Digabung dengan kegiatan Mei	
10 Mei 2007	Siaran Pers bersama jaringan Mahasiswa, pemuda dan keluarga korban mei dan TSS (ARAP: aliansi Rakyat Anti Penindasaan)	Peringatan Momentum mei akan dilakukan: Siaran Pers, Jalan santai Monas-istana-HI, Panggung solidaritas, audiensi kejagung, Ziarah dan tabur Bunga di Mall Klender dan Pondok Rangan	Digabung dengan kegiatan Mei	
11 mei 2007	Aksi dengan keluarga korban dan ARAP TSS, SMI,	Siaran pers berisi pernyataan kegagalan 9 tahun reformasi dan penuntasan kasus TSS dan Mei (meminta pertanggungjawaban penolakan 6 fraksi di DPR)	Kegiatan digabung	
		Aksi menuntut DPR		

		LMND, Kompak, FPPI, FMN, SMKI, SMNI, Pawang, SMNK, LS ADI, YPKP, dll ke DPR	mempertanggungjawaban penolakan 6 fraksi membawa kasus TSS ke Paripurna dengan alasan TSS sudah dinyatakan Pansus 2001 bukan pelanggaran HAM berat. Dan meminta DPR mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM untuk kasus Mei dan TSS	dengan Mei
12 Mei 2007		Malam refleksi Penuntasan kasus pelanggaran HAM: Mei dan TSS	Berisi kata renungan dari Usman Hamid, Romo Sandyawan, Sumarsih. Paduan suara PMKRI dan pemutaran film TSS, penandatanganan spanduk dukungan.	
13 Mei 2007		Tabur Bunga di Mall Klender, pembagian 2000 sticker Mei dan TSS di Monas, Tabur Bunga di depan Istana, jalan santai kampanye kasus Istana-Bunderan HI	KontraS, Paguyuban melakukan tabur bunga dan pembacaan Yasin di parkir mall klender. Sekitar 300-an ibu,ibu dan anak-anak, pemuda dari FKMM melakukan pembagian 2000 sticker penuntasan kasus mei dan TSS di Monas, tabur bunga di istana, dilanjutkan kampanye penuntasan kasus dengan longmarch dari Istana menuju HI membawa bendera2 kecil penuntasan kasus Mei, celemek tragedi mei, papan nisan korban	Digabung dengan kegiatan Mei
2 Juli 2007		Mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI mempertanyakan kelanjutan kasus TSS I II, Mei 98 dan Penghilangan paksa	Isi surat berkaitan dengan mandeknya pembahasan TSS, Mei dan Panculikan pasca pertemuan tripartit dan penolakan BAMUS	
12 Juli 2007		Silaturahmi (Pertemuan korban) 1965, TSS, Mei, pasar Barito, Bojong, Tanjung Priok dengan anggota Komisioner terpilih tahun 2007-2012 yang menyetujui kontrak politik yang diajukan korban sebelumnya (Ridha Saleh, Yosef Adi Prasetyo, Safrudin Simeuleu, Kabul Supriyadie. di KontraS. Sebagai upaya	Sharring, berbagai pengalaman kasus-kasus korban yang belum dituntaskan oleh negara. Dan mendengar visi misi, pengalaman dan komitmen calon anggota komnas HAM untuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM	Sharring, berbagai pengalaman kasus-kasus korban yang belum dituntaskan oleh negara. Dan mendengar visi misi,

		pengawasan kerja komnas ke depan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM		pengalaman dan komitmen calon anggota komnas HAM untuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM
3 Agustus 2007	Pertemuan Keluarga korban penculikan dan TSS Merespon pembentukan pansus penculikan dan penolakan BAMUS DPR untuk TSS (Ibu Sahrir, Ibu Nurhasanah, Ibu Karsiah, Usman, Jhon, Haris, Indri, Yati, Kris)	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan pembentukan Pansus untuk mementum Dorongan tindak lanjut Penolakan Bamus dan penuntasan penculikan agar tidak terulang seperti kasus TSS yang dipolitisir DPR • Kebutuhan perumusan advokasi Internasional • Kebutuhan perumusan gugatan ke DPR • Kebutuhan mendatangi partai2 yang menolak di Bamus • Menagih kontrak politik dengan partai demokrat dengan ibu korban dari Trisakti 	Perlu perumusan dan tindak lanjut pembahasan	
28 Agustus 2007	Sarasehan korban Pelanggaran HAM Jakarta dan Jawa Tengah, Lampung (Korban Tanjung Priok, Korban Talangsari, korban Penculikan, Korban Mei 1998, Korban TSS, Korban Atas Tlogo, Federasi Pedagang, KontraS, IKOHI, PBHI, WALHI) di TIM dengan thema Proyeksi Advokasi Pelanggaran HAM pembicara : Saluh Wandita	Terumuskan Visi Misi, Hambatan Dasar Kepentingan dan strategi yang advokasi yang bisa dilakukan (terangkum dalam matrik tersendiri)		

	14 September 2007	<p>(ICTJ), Haris Azhar (kontraS), Mugiyanto (AFAD)</p> <p>Audiensi Korban Pelanggaran HAM masa lalu (1965, Tj Priok, TSS, Mei) dengan komisioner Komnas HAM di awal kerja Komnas HAM periode 2007-2012</p> <p>Masing-masing Korban menyampaikan hambatan penuntasan kasus-nya yang mandek di berbagai instansi negara: dan meminta Komnas HAM yang baru melakukan terobosan-terobosan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 (Menuntut Komnas juga mengutamakan penyelidikan kasus 65 dan menindaklanjuti hasil temuan komnas sebelumnya terkait pel HAM 65) - TSS : penolakan dan politisasi DPR untuk TSS - Penculikan : kinerja dan pembentukan Pansus di DPR - Tanjung Priok : pengadilan yang memenangkan pelaku, pemutar balikan fakta korban Islah yang didampingi pelaku, referasi korban - Mei : kemandekan di DPR dan Kejagung 	<p>Diterima : Iidhal kasim, Stanley, Syafrudin Simeuleu, Kabul s, Stanley dan Ahmad Baso.</p> <p>Iidhal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - terobosan struktural telah dilakukan (full time dan perubahan struktur - komnas akan memprioritaskan kasus-kasus yang mandek Di Kejagung dan DPR dengan melakukan komunikasi yang lebih efektif (tidak sekedar surat menyurat) - kasus 65 akan dimasukkan dalam agenda kerja Komnas ke depan, juga akan ditindaklanjuti hasil temuan komnas sebelumnya. - Soal Kompensasi akan diadakan kerjasama/komunikasi dengan kekuasaan kehakiman untuk membangun sinergi - TSS : akan menanyakan status hukumnya di kejagung untuk selanjutnya dibangun kesepahaman <p>Kabul S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komnas sedang menginvetarisir semua kasus yang mandek - akan membangun hubungan kelembagaan dengan instansi terkait HAM 	
--	-------------------	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - akan menginisiasikan hak kompensasi, rehabilitasi dan restitusi <p>Stanley :</p> <ul style="list-style-type: none"> - komnas akan membuat rancangan alternatif amandemen UU 26 dan 39 - rapat Paripurna memutuskan ketua agar membangun hub. Kelembagaan dengan Kejagung dan DPR - Komnas akan membahas semiloka indek HAM - Paripurna Komnas akan dilakukan secara terbuka - Komnas sedang melakukan kasus kejahatan Suharto (Petrus, 65 dan Buru) - Hasil pertemuan dengan korban akan dibawa pada rapat pleno mendatang 	
17 Juli 2007	Kunjungan ke Rumah Bu Martini	Silaturahmi dan update kasus TSS		
19 September 2007	Kunjungan dan silaturahmi ke Rumah Ibu Yap Yun Hap	Membicarakan persiapan peringatan semanggi II	Dilaksanakan oleh Sily dan Chris	
22 September 2007	Aksi dan tabur bunga memperingati peristiwa Semanggi II di depan RS Jakarta dilanjutkan dengan diskusi dan buka puasa bersama di rumah keluarga Yap Yun Hap	Aksi dan tabur bunga diikuti oleh Solidaritas korban dan mahasiswa yang tergabung dalam FAMSI Amajaya.	Dalam sharing, ayah dan ibunda Yun Hap berbagi tentang sosok Yun Hap dan mendapat apresiasi yang cukup baik dari forum. Pertemuan dihadiri sekitar 20	

				orang dari solidaritas korban
23 September 2007	Ziarah ke kuburan Yap Yun Hap pondok Rangon Jakarta Timur	Tabur bunga dan doa bersama di makam Yun Hap		
12 November 2007	Misa dirumah Ibu Sumarsih sembilan tahun peringatan semanggi I	Kurang lebih dihadiri 50 orang yang terdiri dari Jemaat Gereja dan keluarga korban		
13 November 2007	Tabur bunga di kampus Almajaya Jakarta peringatan Semanggi I dan dilanjutkan dengan aksi dan tabur bunga di Kejaksaan Agung RI kemudian Ziarah ke makam Alm Sigit Prasetyo	Aksi dihadiri oleh lebih dari 60 orang kemudian melakukan pawai dari kejaksaan ke makam tanah kusir		